

346.078

Pen

t

BANKRUPTCY-LAW

FH. R.

Hel. 131. 7 Juli 2004  
uho

**LAPORAN PENELITIAN**  
**TINJAUAN TENTANG HALAL HARAMNYA**  
**BUNGA BANK DAN PENGARUH FATWA MUI**  
**TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP**  
**BANK YANG BEROPERASI SECARA**  
**KONVENSIONAL**




Oleh:

**Muljani Morisco, SH, M. Hum**  
**Th. Anita Christiani, SH, M. Hum.**

**Dosen Fakultas Hukum UAJY**

**Fakultas Hukum**  
**Universitas Atmajaya Yogyakarta**  
**2004**

	<b>MILIK PERPUSTAKAAN</b> <b>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</b>
Diteliti	: 07 JUL 2004
Inventarisasi	: 90/FH/Hel. 7 Pen/2004.
Klasifikasi	: Rf: 346.078 Pen t
Selasa Diproses	: 25 JUL 2004

## IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1.a. Judul : **Tinjauan Tentang Halal Haramnya Bunga Bank Dan Pengaruh Fatwa**

**MUI Terhadap Kepercayaan Nasabah Terhadap Bank Yang**

**Beroperasi Secara Konvensional**

b. Macam Penelitian : Terapan

c. Kategori penelitian : II

2. Kepala Proyek Penelitian :

a. Nama : Muljani Morisco, S.H, M.Hum.

b. Jenis kelamin : Perempuan

c. Pangkat/golongan : III d

d. Jabatan fungsional : Lektor Kepala

e. Fakultas : Hukum

f. Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

g. Bidang Keahlian : Ilmu Hukum

3. Jumlah anggota pelaksana : 1 orang

4. Jangka waktu penelitian : 5 bulan

5. Biaya yang diperlukan : Rp.3.000.000,-

Yogyakarta, Juli 2004

Anggota

Ketua Tim Peneliti

Th.Anita Ch, SH, M.Hum.

Muljani Morisco,SH,M.Hum

Mengetahui,  
Dekan Fak Hukum:

  
(J. Widiantoro, S.H, M.H)

 Menyetujui,  
Kepala LPU:

  
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS  
(G. N. H. Mediastika, ST, Ph D)

02 JUL 2004

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman pengesahan.....	ii
Daftar isi.....	iii
 Bab I PENDAHULUAN	
I. Latar belakang masalah.....	1
II. Permasalahan.....	3
III. Tujuan penelitian.....	3
IV. Metode Penelitian.....	4
 Bab II PEMBAHASAN	
I. Tinjauan tentang Halal Haramnya Bunga Bank.....	6
I.1. Pengertian Halal dan Haram.....	6
I.2. Pengertian Riba.....	9
I.3. Macam-macam Riba.....	10
I.4. Larangan Riba.....	11
I.5. Bunga Bank dan Riba.....	16
I.6. Kekuatan Mengikatnya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank adalah Haram Hukumnya.....	25

II.	Tinjauan Tentang Fatwa MUI Dikaitkan Dengan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan.....	25
II.1.	Bunga Dalam Perspektif Ekonomi.....	27
II.2.	Tinjauan Umum tentang bank .....	30
II.3.	Pengaruh Fatwa MUI tentang Larangan Riba Terhadap Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Perbankan.....	41

### BAB III. PENUTUP

#### Daftar Pustaka

## **BAB I**

# **TINJAUAN TENTANG HALAL HARAMNYA BUNGA BANK DAN PENGARUH FATWA MUI TERHADAP KEPERCAYAAN NASABAH TERHADAP BANK YANG BEROPERASI SECARA KONVENSIONAL**

### **I Pendahuluan**

Seperti diketahui pada tanggal 16 Desember 2002 Sidang Ijtima Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menetapkan bahwa praktik bunga termasuk riba haram hukumnya (Kompas 18 Desember 2002). Bunga yang dimaksud adalah bunga dalam lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan koperasi. Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan khususnya dikalangan perbankan. Hal tersebut disebabkan perbankan di Indonesia menghimpun 952,60 triliun dana masyarakat di bank konvensional yang selama ini menggerakkan roda perekonomian nasional.

Halal dan haramnya suatu perbuatan dalam hukum Islam terkait dengan dosa dan pahala yang datangnya dari Allah. Hal ini disebabkan karena hukum islam bersumber dari wahyu Illahi, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (Habblumminallah) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar (Hablumminnannas).

Suatu perbuatan dikatakan halal disebut juga mubah atau jaiz, adalah apa yang diperkenankan oleh syara' untuk melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapat pujian, celaan, pahala atau siksa (Wahab Az-Zuhaili, 1997,7).

Sedangkan haram adalah apa yang dituntut oleh syara' secara tegas untuk ditinggalkannya suatu perbuatan, sehingga apabila seseorang meninggalkan perbuatan itu maka dia mendapat pahala tetapi apabila mengerjakan larangan itu maka dia berdosa. (Wahab Az-Zuhaili, 1997,8)

Dalam menjalin hubungan antara manusia satu dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar yang dalam hukum islam merupakan bidang mu'amalah mempunyai kaidah hukumnya kebolehan. Termasuk didalam mu'amalah ini misalnya melakukan kegiatan yang menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia misalnya jual beli, simpan pinjam, usaha bersama yang berdasarkan pada ajaran tolong menolong dan menghindarkan diri dari praktek riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sedangkan tentang bunga bank Al-Qur'an tidak mengaturnya. Untuk itu perlu ada ijtihad untuk menetapkan hukumnya bunga bank tersebut. Dalam penetapan hukum terhadap bunga bank tersebut tentu saja banyak pendapat, seperti halnya baru-baru ini dengan dikeluarkan fatwa MUI bahwa bunga bank tersebut haram hukumnya.

## **II. Permasalahan**

1. Apakah bunga bank tersebut memenuhi unsur riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an?
2. Apakah Fatwa MUI tersebut memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang konvensional ?

## **III. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah bunga bank tersebut memenuhi unsur riba sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui apakah Fatwa MUI tersebut memberikan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang konvensional .

## **IV. Metode Penelitian**

### **IV.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-perundangan dan buku-buku atau literature yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

## **IV.2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari peraturan-perundangan, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dibedakan menjadi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti peraturan-perundangan yang berkaitan dengan bidang Hukum Islam dan Perbankan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan keterangan serta penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yaitu hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum.

## **IV.3 . Metode pengumpulan data**

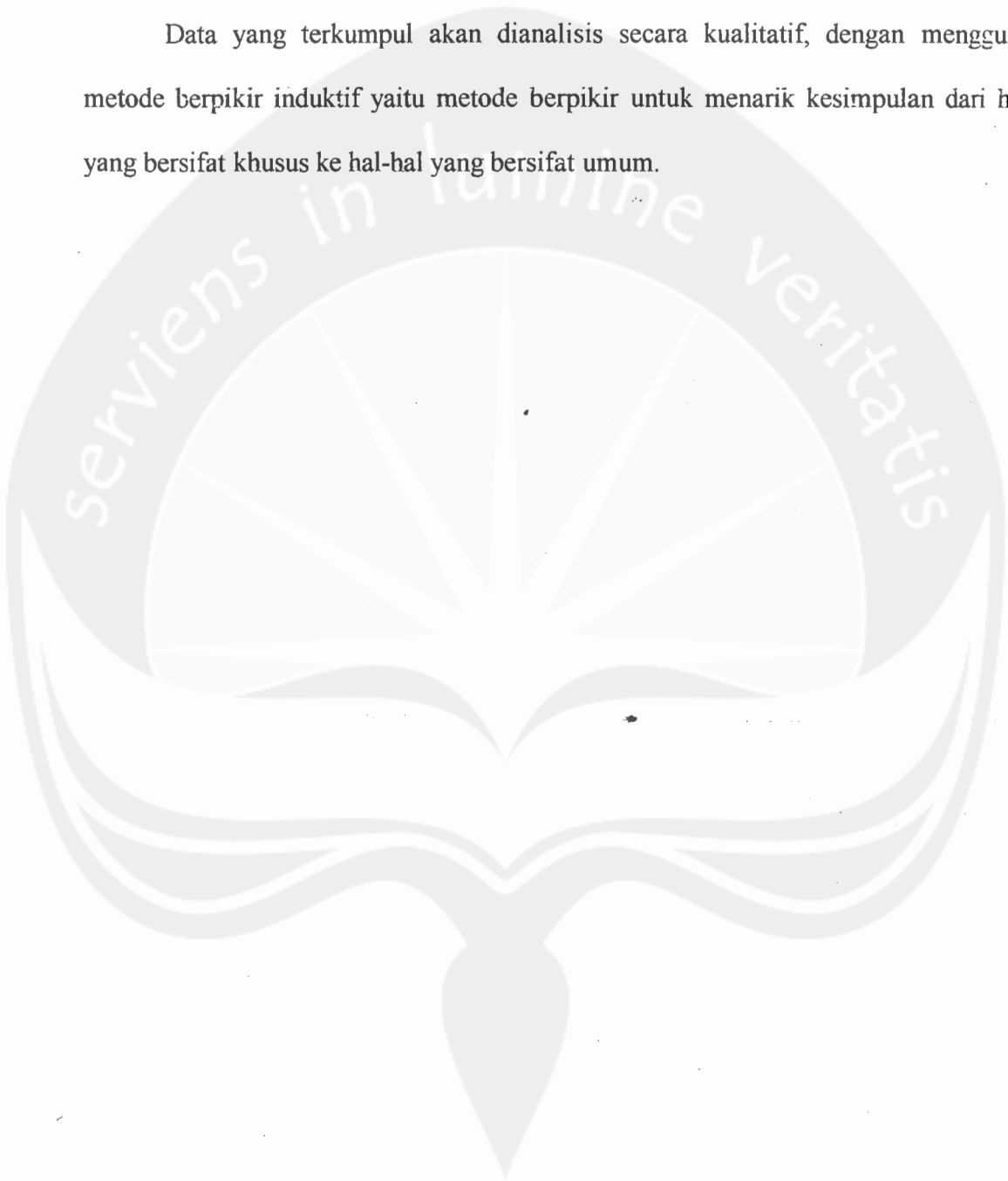
Sarana untuk mengumpulkan data yaitu melalui studi pustaka atau dokumen. Pengumpulan data melalui studi pustaka adalah cara mengumpulkan data dengan tidak



secara langsung pada responden tetapi melalui data-data tertulis yang mendukung permasalahan yang diteliti.

#### **IV.4. Metode analisis data**

Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode berpikir induktif yaitu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **I. TINJAUAN TENTANG HALAL HARAMNYA BUNGA BANK**

##### **I.1. Pengertian Halal dan Haram**

Halal dan haramnya suatu perbuatan dalam hukum Islam terkait dengan dosa dan pahala yang datangnya dari Allah. Hal ini disebabkan karena hukum Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (Habblumminallah) dan mengatur hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar (hablumminnannas).

Suatu perbuatan dikatakan halal disebut juga mubah atau jaiz, adalah apa yang diperkenankan oleh syara' melakukannya, atau diberi pilihan oleh syara' antara melakukannya atau tidak melakukannya, tanpa mendapat pujian, celaan, pahala atau siksa (Wahab Az-Zuhaili, 1997, 7)

Suatu perbuatan dapat dikatakan halal atau mubah dapat diketahui dengan jalan :

- a. Perbuatan tersebut ditetapkan secara tegas kebolehan oleh syara'. Misalnya dipergunakannya kata tidak mengapa ("la junaha), tidak ada halangan ( la haraja), tidak berdosa ( la itsma) seperti misalnya dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 235:....dan tidak ada halangan bagi kamu meminang wanita –wanita itu dengan sindirian yang baik ( Muhktar Yahya dan Fatchurrahman: 1983, 143-144)
- b. Diperintahkan oleh syari' untuk melakukannya, tetapi ada qarinah (petunjuk) bahwa perintah itu sifatnya hanya mubah saja. Misalnya dalam surat Al-Maidah

ayat 2: .....dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka  
berburulah (Muhtar Yahya dan fatchurrahman: 1983, 44)

- c. Ditetapkan kebolehannya untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan “bara’atul  
ashliyahnya” artinya bebas menurut asalnya ( Muhtar Yahya dan Fatchurrahman:  
1983, 45) Artinya bahwa segala perbuatan dalam bidang mu’amalah menurut  
asalnya adalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dalam Al-Qur’an  
maupun hadist.

Jadi dalam kaitan dengan pembentukan lembaga perbankan dalam hubungan  
antara manusia dengan manusia juga boleh sepanjang tidak dilarang oleh syara’.

Suatu perbuatan dikatakan haram adalah apa yang dituntut oleh syara’ secara  
tegas untuk ditinggalkannya suatu perbuatan, sehingga apabila seseorang  
meninggalkan perbuatan itu maka dia mendapat pahala tetapi apabila mengerjakan  
larangan itu maka dia berdosa ( Wahab Az-Zuhaili. 1997,8)

Suatu perbuatan dikatakan haram, dapat diketahui dengan jalan:

- a. Terdapat kata-kata yang tegas melarangnya dalam kitab Syari’ misalnya  
dipakai kata-kata: diharamkan bagimu, seperti misalnya dalam firman Allah  
surat al Baqarah ayat 275: ....tetapi Allah telah menghalalkan jual beli dan  
mengharamkan riba.
- b. Kalimat yang melarang menggunakan fi’il nahi (kata kerja yang sifatnya  
melarang) dan diikuti suatu petunjuk bahwa perbuatan itu benar-benar  
dilarang. Misalnya surat al-Isra ayat 32:....dan janganlah kamu mendekati zina,  
sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.

- c. Diperintahkan untuk menjauhi. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 30: ... maka jauhilah kenajisan berhala dan jauhilah perkataan dusta
- d. Diancam adanya suatu hukuman atau siksa bagi yang melakukannya. Misalnya firman Allah dalam surat An-Nur ayat 4: ... dan orang-orang yang menuduh wanita –wanita berzina, dan dia tidak membawa empat orang saksi. maka deralah mereka delapan puluh kali dera.

Dari beberapa petunjuk bahwa suatu perbuatan itu halal atau haram hukumnya, tidak harus memenuhi semua yang ada didalamnya akan tetapi salah satu dari petunjuk itu saja sudah dapat disimpulkan bahwa perbuatan itu termasuk perbuatan yang halal atau yang haram, seperti misalnya tentang riba yang ditunjukkan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 tersebut memenuhi petunjuk huruf a, yaitu dipakai kata yang tegas menunjukkan keharamannya karena didalam ayat tersebut dengan jelas dipakai kata :”mengharamkan riba” Jadi dari ketentuan ini menunjukkan secara jelas bahwa riba hukumnya haram.

Seperti dijelaskan di atas bahwa dalam menjalin hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar yang dalam hukum Islam merupakan bidang mu’amalah mempunyai kaidah hukumnya kebolehan, artinya bahwa semua perbuatan yang termasuk kategori mu’amalah boleh dilakukan kecuali yang dilarang dalam Al-Qur’an maupun Hadist (Muhammad Daud Ali, 1990, 57) Termasuk dalam mu’amalah ini misalnya melakukan kegiatan yang menyangkut aspek ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia misalnya jual beli, simpan pinjam, hutang - piutang, usaha bersama yang berdasarkan pada ajaran tolong-menolong dan

menghindarkan adanya praktek riba yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an, sedangkan tentang bunga bank Al-Qur'an tidak mengaturnya. Untuk itu maka perlu ada ijtihad untuk menetapkan hukumnya bunga bank tersebut, meskipun sampai saat sekarang ini masih belum ada kesepakatan.

## **I.2. Pengertian Riba**

Riba dari segi bahasa berarti tambahan (ziyadah) dan menurut istilah riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, sebagaimana hal ini dilarang oleh Allah dalam firmanNya pada surat An-Nisa ayat 29 (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 37)

Isi ketentuan surat An-Nisa tersebut ialah: Hai- orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta antar kamu dengan cara yang batil, kecuali perniagaan yang terjadi dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pengertian pengambilan secara batil artinya pengambilan tambahan dari pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh hukum syar'i (H. Karnaen Perwat Atmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, 10)

Menurut Imam Nawawi dari madzab Syafi'i bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 39)

Menurut Hanafi riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwadh atau padanan yang dibenarkan oleh syara' atas penambahan tersebut ( Muhammad Syafi'i Antonia, 2001, 38-39)

Pada masa Jahiliyah riba dilakukan oleh masyarakat dengan cara meminjamkan uang kepada seseorang pada waktu sempit dan sangat memerlukan dengan syarat agar pembayarannya dalam waktu tertentu serta berlipat ganda, sehingga hutang itu bila tidak dibayar pada waktunya tambahan ribanya menjadi banyak yang tentu saja memberatkan bagi sipeminjam (Fuad Mohd Fachrudin, 1985, 8)

Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa riba itu mempunyai unsur:

- a. tambahan dari jumlah pinjaman pokok
- b. adanya batas waktu
- c. unsur memberatkan karena berlipat ganda.

### **I.3. Macam-Macam Riba**

Riba dibedakan dalam dua macam, yaitu:

- a. Riba Nasii-ah, artinya riba yang jelas, adalah riba yang biasa diterapkan oleh orang-orang dimasa Jahiliyah. Bila orang yang berhutang terlambat mengembalikan, maka ia harus menambah jumlah uang yang harus dikembalikan. Semakin lama keterlambatannya maka semakin bertambah pula jumlah hutangnya. Riba nasii-ah ini diharamkan karena dilihat dari tujuannya

yang sangat memberatkan bagi sipeminjam tanpa orang yang berhutang itu bisa mengambil manfaatnya apa-apa (Shalih Fauzan Al-Fauzan: 2002, 94-95)

**b. Riba Fadhal ialah riba yang tersembunyi.**

Riba jenis ini juga dilarang, karena bisa menjadi sarana melakukan riba nasii-ah, seperti disebut dalam hadist Abu Said Al Khudri: “Janganlah menjual satu dirham dengan dua dirham, karena aku khawatir kalian akan melakukan riba ( Shalih Fauzan al Fauzan: 2002, 95).

Diantara kedua macam riba ini nampak adanya unsur riba yaitu pada riba nasii-ah, yaitu adanya unsur tambahan hutang pokok dan adanya waktu tertentu, sehingga tentu saja riba semacam ini haram hukumnya, sesuai ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275 dan surat An-Nissa ayat 29.

Untuk riba Fadhal masih masih diperbolehkan dalam kondisi darurat, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnul Qoyim Rahimahullah: Karena sesuatu yang diharamkan untuk menutup jalan menuju kerusakan hukumnya lebih ringan daripada sesuatu yang diharamkan secara langsung ( Shalih Fauzan al Fauzan: 2002, 96). Untuk riba nasii-ah yang secara tegas disebutkan keharamannya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tersebut ayat 275.

#### **I.4. Larangan Riba**

Al-qur'an secara tegas mengharamkan adanya praktek riba, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist.

a. Larangan riba dalam Al-Qur'an atau diharamkannya riba dalam Islam tidak diturunkan sekaligus tetapi bertahap (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 48-49)

1) Pada tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman dengan riba itu adalah menolong mereka yang memerlukan sebagai perwujudan taqwanya kepada Allah, sebagaimana terdapat dalam surat Ar-Ruum ayat 39, yang artinya: "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar menambah harta manusia, maka riba itu tidak merubah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

2) Pada tahap kedua riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, dan Allah mengancam dengan keras dengan siksa yang pedih sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nissa ayat 160-161, -----mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Allah telah menyediakan bagi mereka siksa yang pedih.

3) Pada tahap ketiga, riba diharamkan dengan dihubungkan dengan adanya suatu tambahan yang berlipat ganda sebagaimana ditentukan dalam surat Ali Imran 130, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan"



4) Pada tahap terakhir Allah SWT dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, seperti terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278-279, yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat(dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

5) Dalam surat Al-Baqarah ayat 275-280, yang artinya:”Adapun orang yang memakan riba itu tidak akan dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang digumuli syaitan, oleh karena gilanya. Demikianlah karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba; Allah menghalalkan jual-beli, tetapi Allah mengharamkan riba (Fuad Mohd Fachrudin.1985,81)

Dalam tahapan diharamkannya riba tersebut sesuai dengan ciri hukum Islam bahwa ketentuan hukumnya tidak turun sekaligus. Hal ini juga terhadap diharamkannya riba, yang pada tahapan pertama hanya menolak anggapan yang mempersamakan pemberian pinjaman dengan riba sama dengan menolong seseorang, dan Allah menjelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 39 tersebut bahwa tambahan yang diperoleh dari hasil riba tidak akan mendapatkan pahala disisi Allah, dan hal ini ditunjukkan pahala bagi orang yang berzakat. Jadi pada taraf ini belum diharamkannya riba.

Pada tahap yang kedua bahwa riba itu merupakan perbuatan yang buruk dan Allah mengancam dengan siksa. Dengan ditunjukkan adanya siksa ini maka sesuai dengan salah satu ciri suatu perbuatan yang haram yaitu adanya siksa, maka meskipun secara tegas tidak ditentukan hukumnya haram, namun dari adanya sanksi dari Allah maka hukumnya riba adalah haram.

Pada tahap yang ketiga sudah tegas disebutkan bahwa riba itu hukumnya haram, sebagaimana dapat dilihat pada surat Ali Imran ayat 130, yang secara jelas dipakai kata-kata yang melarang, yaitu kata: janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda..... Kata "janganlah" ini merupakan salah satu ciri bahwa perbuatan itu hukumnya haram.

Pada tahap yang keempat sudah secara tegas dan jelas diperintahkan untuk meninggalkan riba yang sekaligus ditunjukkannya sanksi bagi yang melanggar larangan itu, sebagaimana hal ini merupakan ciri bahwa suatu perbuatan itu haram hukumnya, yaitu perintah menjauhi perbuatan tertentu yang dalam hal ini riba, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279.

Demikian juga ketentuan surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 280, secara tegas menunjukkan ciri bahwa riba itu dilarang yaitu ditunjukkan sanksi kepada mereka yang mengatakan jual beli sama dengan riba.

#### b. Larangan riba dalam Hadist

Pelarangan riba tidak saja hanya terdapat dalam Al-Qur'an tetapi juga terdapat dalam hadist. Rasulullah dalam amanah terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke 10 H, menekankan bahwa Allah telah melarang kamu memakan riba,

oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan, modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 51)

Hadist riwayat Muslim, meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ketangan (cash). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah

HR muslim dari riwayat Jabir, bahwa Rasulullah saw, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, mereka itu sama (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 53-54).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. pada perjalanan mi'raj, melihat orang-orang yang perutnya seperti rumah, didalamnya dipenuhi ular-ular yang kelihatan dari luar. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Dan dijawab oleh Jibril bahwa mereka itu adalah orang-orang yang memakan riba.

Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Riba itu mempunyai 73 tingkatan pintu, yang paling rendah (dosanya) sama dengan seorang yang melakukan zina dengan ibunya (Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, 54)

Dari beberapa hadist tersebut di atas juga menunjukkan adanya hukum haram bagi riba, seperti halnya Rasul secara tegas memerintahkan untuk

meninggalkan riba, ini juga merupakan salah satu ciri adanya suatu perbuatan yang hukumnya haram. Demikian pula Rasul menunjukkan adanya sanksi yang sangat pedih bagi yang memungut riba, dan adanya sanksi ini menunjukkan bahwa perbuatan itu hukumnya haram.

Dari Al-Qur'an dan Hadist tersebut diatas dapat diketahui bahwa riba itu hukumnya haram, seperti diketahui dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist yang didalamnya terdapat kata yang tegas menunjukkan keharamannya, yaitu dengan kata-kata untuk meninggalkan atau menjauhi, serta adanya sanksi Allah jika hal itu dikerjakan, sehingga bagaimanapun riba itu hukumnya haram.

#### **1.5. Bunga Bank dan Riba**

Bunga bank atau sering disebut rente dalam praktek perbankan merupakan riba atau tidak, sebagaimana riba diharamkan oleh Islam, dalam kenyataannya sangatlah tidak mudah untuk menetapkan hukumnya, meskipun pada masa dulu kira-kira dekade th 1970 pendapat bunga bank adalah juga riba karena keduanya mempunyai illah hukum yang sama, yaitu sama-sama bunga uang atau ada tambahan uang pokok oleh karena itu hukumnya haram, meskipun sebenarnya kalau dikaji antara keduanya sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat prinsip (Fuad Moch Fachruddin, 1985, 36-37):

Bunga bank atau sering disebut rente, ialah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank dan sebagainya, karena jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan suatu perusahaan si peminjam, sehingga usahanya dapat maju dan

keuntungannya bertambah banyak. Dilain pihak bank mendapatkan bagian keuntungan yang layak yang dalam istilah ekonomi disebut rente .

Riba didalamnya terdapat unsur pemerasan terhadap orang yang kesempitan hidupnya, padahal seharusnya diberi pertolongan untuk melepaskan diri dari tekanan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer, tetapi karena dia tidak sanggup membayar uang itu kembali maka kepadanya diberi tempo dengan ketentuan bahwa uang itu akan bertambah. Inilah praktek riba yang pada terjadi zamannya Rasul dan diperintahkan untuk dihentikan, dan riba semacam ini adalah disebut riba nasii-ah aatau riba jahiliyah (Fuad Moch Fachruddin, 1985, 37)

Dalam hadist Rasul yang diriwayatkan Bukhari-Muslim, mengatakan bahwa tidak ada riba selain riba annasii-ah. Oleh karena itu dari pengertian rente yang berarti keuntungan maka rente bukanlah riba. Tetapi jika dikatakan adanya tambahan pada pokok pinjaman yang dibatasi dengan waktu tertentu maka rente termasuk riba, krena memenuhi adanya unsur riba.

Menurut Bung Hatta perbedaan antara rente dengan riba ialah bahwa rente sifatnya produktif, artinya peminjam tidak menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan primer (makan) tetapi untuk diproduksi yang nantinya akan menghasilkan keuntungan, maka sudah sepantasnya jika bank juga mendapat keuntungan dari itu. Riba sifatnya konsumtif, ia diambil dari orang yang meminjam uang karena kesempitan hidupnya (Fuad Mochd Eachruddin, 1985, 39)

Dari pendapat ini jika didasarkan pada apakah pinjaman untuk diproduksi atau hanya untuk kepentingan yang konsumtif sifatnya sangatlah

kurang dapat diketahui oleh pihak bank sendiri, sehingga sulit untuk mengatakan apakah rente sifatnya produktif atau konsumtif.

Menurut Moh. Rasyid Ridha bahwa riba yang dilarang adalah riba annasiah, sebagaimana dijalankan oleh kaum Jahiliyah, artinya riba macam inilah yang diharamkan, dan dia melipat gandakan uangnya, sehingga memberatkan bagi peminjam. Menurut beliau tidaklah termasuk riba jika orang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk menarik keuntungan, dengan ketentuan bahwa sebagian tertentu dari keuntungannya itu diserahkan kepada sipemilik harta. Hal demikian disebabkan karena hubungan antara si pengusaha dengan pemilik harta atau uang saling menguntungkan, ini sangat berbeda sekali dengan riba annasiah yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan bahkan mencelakakan orang lain (Fuad Mochd Fachruddin, 1985, 39)

Dari pendapat diatas maka didalam peminjaman itu terdapat adanya pembagian keuntungan antara pihak bank dan pihak peminjam

Dari pendapat keduanya di atas dapat diketahui adanya kesamaan pendapat diantara mereka, bahwa riba yang dilarang adalah riba annasii-ah, yang menurut Moh. Hatta riba yang konsumtif sedangkan menurut Rasyid Ridha disebut riba anasii-ah yang hanya menguntungkan satu pihak saja.. Bahwa menarik pembagian keuntungan dari harta yang diperoleh orang lain dari suatu perusahaan adalah patut, tidak tercela dan tidak haram, entah apapun namanya apakah rente apakah bunga bank (Fuad Moscd Fachruddin, 1985, 39-40).

Pendapat lain dari H.M Manur juga tidak keberatan tentang rente atau bunga bank, tetapi dikatakan hanya dalam keadaan darurat, mengingat untuk masa

sekarang ini dalam sistem perekonomian kita tidak bisa lepas dari jaring-jaring rente( Fuad Mochd Fachruddin, 1985,40)

Ibrahim Hosen berpendapat meskipun ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist sudah sangat jelas dan sharih, masih saja dapat dibenarkan adanya pengambilan bunga bank, dengan alasan:

- a. dalam keadaan darurat
- b. hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang, sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperbolehkan (halal)
- c. Bank selaku lembaga tidak masuk dalam kategori mukallaf, dengan demikian tidak terkena kitab syar'i ( Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, 54)

Untuk memahami tentang keadaan darurat haruslah memahami tentang keadaan darurat yang dibolehkan oleh syara' (Allah dan Rasul-Nya). Menurut Imam Suyuti, yang dimaksud keadaan darurat adalah suatu keadaan emergency yaitu jika seseorang tidak segera melakukan sesuatu dengan tindakan cepat, akan membawa kejurang kehancuran atau kematian.

Menurut Al Zarkasyi dan Suyuti darurat ialah sampainya seseorang pada batas diman jika ia tidak memakan yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati binasa, seperti jika seseorang yang terpaksa dan memakan sesuatu yang dilarang, dan jika dia tidak memakannya dia akan terancam jiwanya ( Muhammad Syafi'i Antonio, 1992, 71)

Menurut ulama Makiyah, ulama Syafi'iah maupun Muhammad Abu Zahra ada kesamaan pendapat tentang darurat itu, yaitu adanya kuatir akan binasanya

jiwa, baik pasti ataupun dalam perkiraan, atau kuatir akan binasa jiwanya jika tidak memakan yang dilarang (Mohammad Syafi'i Antonio, 1992, 71-72)

Menurut Mohmmad Syafi'i Antonio, definisi di atas terlalu sempit, karena hanya menyangkut masalah makanan yang mengenyangkan, tidak menyangkut pengertian yang lebih luas dari darurat, mengingat hal ini berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau meninggalkan yang wajib, untuk itu beliau memberikan definisi darurat sebagai berikut: Darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia kuatir akan terjadi kerusakan (dhahar) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya atau menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari sayarat-syarat yang ditentukan oleh syara'.

Batasan keadaan darurat:

a. darurat yang dimaksud harus sudah ada, bukan masih ditunggu, artinya kekhawatiran akan binasanya atau hilangnya jiwa atau harta itu benar-benar ada dalam kenyataan dan haal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya yang hakiki terhadap lima kebutuhan mendasar yang harus dipelihara oleh mukalaf, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.



b. Orang yang terpaksa itu tidak ada pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan syara' atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melakukan yang haram

c. Kemudharatan itu memang benar benar memaksa untuk dilakukan karena khawatir terancam jiwanya

d. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar hak-hak orang lain, melanggar keadilan

Mengingat batasan tentang keadaan darurat tersebut nampaknya untuk saat ini dengan perkembangan dunia perbankan di Indonesia dengan munculnya bank syari'ah maka keadaan darurat sudah dapat diatasi, meskipun kalau dilihat di Indonesia ini masih belum mencukupi kebutuhan umat Islam dan bahkan banyak diantara umat slam yang belum mengenal tentang bank syari'ah. Untuk itu perlu adanya pemasyarakatan tentang bank syari'ah serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bank syari'ah dengan salah satu produknya adalah mudharabah atau bagi hasil.

Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah yang dikemukakan pada tahun 1976, memutuskan bahwa bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk musytabihat (dianggap meragukan), meskipun masih membolehkannya.

Para ulama dari Nadhlatul Ulama terdapat perbedaan pendapat tentang bunga bank ini, yaitu:

a. Haram hukumnya sebab termasuk utang yang dipungut rente

- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum masih berselisih pendapat tentangnya

Dari perbedaan pendapat tersebut pada tahun 1982, Lajnah Bahsul Masa'il NU dalam sidangya di Bandar Lampung memberikan kesimpulan:

- a. Ada pendapat yang mengatakan bahwa antara bunga bank dengan riba hukumnya sama secara mutlak, sehingga diharamkan. Dari pendapat ini ternyata mendasarkan pada beberapa variasi keadaan, yaitu :

- 1) bahwa bunga bank itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram
- 2) bunga bank itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi boleh sementara sistem perbankan yang islami atau sistem bank tanpa bunga belum beroperasi
- 3) bunga bank itu sama dengan riba, hukumnya haram, akan tetapi boleh dilakukan sebab adanya kebutuhan yang kuat.

- b. Pendapat kedua bunga bank tidak sama dengan riba sehingga hukumnya boleh, juga dengan beberapa variasi keadaan sebagai berikut:

- 1) bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram, sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal
- 2) bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal
- 3) bunga yang diterima dari deposito hukumnya boleh

- 4) bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum

Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang diselenggarakan di Karachi, Pakistan, pada bulan Desember th 1970, telah menyepakati dua hal utama, yaitu:

- a. Praktek bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari'at Islam
- b. Perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Majelis Ulama baru-baru ini mengeluarkan fatwanya bahwa bunga bank itu haram. Hal ini kiranya tidaklah berlebihan, mengingat jauh sebelumnya juga sudah banyak yang mengemukakan pendapatnya bahwa bunga bank itu haram, meskipun dari pendapat di atas juga masih ada yang berpendapat bunga bank itu halal. Memang jika dilihat pada waktu sebelum ada bank yang beroperasi dengan mendasarkan prinsip-prinsip syari'at Islam maka halal hukumnya bunga bank itu, mengingat keadaan darurat atau suatu kebutuhan yang mendesak, namun untuk masa sekarang ini mengingat bahwa di Indonesia kini sudah banyak didirikan bank syari'ah, maka sebaiknya sedikit demi sedikit pendapat bahwa bunga bank itu halal haruslah dihindari, sebagai sikap penghati-hati dalam menjalankan syari'ah Islam.

Dalam menghadapi hukum yang haram atau halal bunga bank ini hendaklah umat Islam berhati-hati, agar menjauhkan diri dari terjerumus kedalam perbuatan haram. Apabila seseorang tidak mampu menentukan hukumnya suatu

persoalan, hendaknya hal itu dipandang saja sebagai yang haram untuk berpegang pada prinsip menutup kesempatan yang telah menjadi ketetapan dalam Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam beberapa hadist Rasul (Wahbah Azzuhaili, 1997, 14):

- a. Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mengatakan: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, tetapi jika antara keduanya ada beberapa persoalan yang meragukan. Barangsiapa yang menghindari hal-hal yang meragukan berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan jika siapa yang terperosok ke dalam hal-hal yang meragukan, maka berarti ia telah terperosok kedalam hal yang haram .
- b. Hadist riwayat Muslim dari al Nuwas ibn Sam'an, Rasûl bersabda: Yang baik adalah akhlak, dan dosa adalah sesuatu yang berlawanan dengan kata hati, dan anda tidak suka jika hal itu diketahui orang lain.
- c. Hadist riwayat al turmuzi: Kalau bergabung antara yang haram dan yang halal, maka yang haram selalu mengungguli yang haram

Pendapat Ibnu Qayim, dalam bukunya Qawa'id al Ahkam, dikatakan tinggalkan yang meragukan bagi anda dan ambilah yang tidak meragukan bagi anda.

## **I.6. Kekuatan mengikatnya fatwa MUI tentang bunga bank adalah haram hukumnya.**

Jika diingat bahwa Al-Qur'an tidak mengatur tentang bunga bank, tetapi yang diatur adalah riba yang hukumnya haram, maka untuk itu MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank itu haram hukumnya. Sebagai hasil ijtihad, maka fatwa MUI ini bisa diterapkan kepada kaum muslimin umumnya atau orang yang bertanya atau kepada diri orang yang berijtihad itu sendiri. Terhadap kaum muslimin pada umumnya hasil ijtihad tidak mengikat, dan tidak mengharuskan. Hal ini disebabkan hasil ijtihad seseorang masih dapat dijadikan objek ijtihad mujtahid yang lain. Pada orang yang berijtihad tentu saja mengikat pada dirinya sendiri, karena hasil ijtihadnya merupakan hukum syara' yang sesuai dengan keyakinannya. Kepada yang bertanya maka hasil ijtihad itu mengikat, karena orang yang bertanya tersebut berpegang pada mujtahid yang ditanya (Ahmad Hanafi, 1970, 170-171).

## **II. Tinjauan Tentang Fatwa MUI Dikaitkan Dengan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga perbankan**

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini keberadaan bank merupakan sesuatu yang penting. Hal ini dapat dilihat bahwa fenomena transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat khususnya kalangan pelaku usaha yang menggunakan system pembayaran yang dilakukan mengarah kepada system pembayaran giral yang menggunakan instrumen surat berharga. Hal ini berarti bahwa keterlibatan perbankan

dalam mekanisme yang mereka sepakati merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Hal lain yang perlu dicermati adalah peran lembaga perbankan sebagai suatu lembaga yang menghimpun sebagian besar dana masyarakat dan kemudian mengembalikan lagi dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menggerakkan dan menopang perekonomian di negara Indonesia.

Bank menurut jenisnya dapat dibedakan menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank tersebut diperbolehkan untuk beroperasi secara konvensional atau dapat pula beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau syariah. Dalam prakteknya dapat dilihat bahwa masyarakat lebih mengetahui atau menggunakan perbankan dengan sistem konvensional daripada dengan sistem bagi hasil. Keberadaan perbankan yang beroperasi secara syariah ini memang belum lama diperkenalkan di Indonesia dibandingkan dengan perbankan yang beroperasi secara sistem konvensional.

Seperti diketahui pada tanggal 16 Desember 2003 Sidang Ijtima Ulama Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa yang menetapkan bahwa praktik bunga termasuk riba haram hukumnya (Kompas 18 Desember 2003). Bunga yang dimaksud adalah bunga dalam lembaga keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan koperasi. Fatwa tersebut menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan khususnya dikalangan perbankan. Hal tersebut disebabkan perbankan di Indonesia menghimpun 952,60 triliun dana masyarakat di bank konvensional yang selama ini menggerakkan roda perekonomian nasional. Fatwa tersebut dikhawatirkan akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga perbankan yang beroperasi secara konvensional . Di lain pihak lembaga perbankan yang beroperasi secara konvensional merupakan lembaga yang paling utama menggerakkan sektor riil dalam perekonomian di Indonesia.

## **II.1 Bunga Dalam Perspektif Ekonomi**

Tingkat bunga memegang peranan penting dalam setiap perekonomian yang menggunakan uang untuk menyimpan nilai. Tingkat bunga juga dipakai dalam lembaga perbankan khususnya bank konvensional dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selanjutnya perlu dikaji mengenai latar belakang munculnya bunga dalam kegiatan perekonomian.

Pengertian tingkat bunga dalam bidang ekonomi disamakan dengan “harga” dari penggunaan uang atau dapat dipandang sebagai “sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Boediono, 1985,1). Sebagai contoh bila seseorang meminjam uang dengan pinjaman pokok Rp.1.000.000 dengan tingkat bunga 10 % pertahun maka orang tersebut akan membayar pinjaman pokoknya sebesar Rp.1.000.000 dan bunga Rp.100.000 selama setahun.

Persoalannya kemudian mengapa orang harus membayar bunga dari penggunaan uang tersebut ? , untuk menjawab pertanyaan tersebut akan dikaji beberapa teori yang berkaitan dengan konsep penggunaan tingkat bunga tersebut.

### **1. Teori dari mazhab klasik**

Teori yang diberikan oleh mazhab klasik ini mengatakan bahwa bunga merupakan harga yang terjadi di pasar dana investasi (Boediono,1985:76). Teori ini memberikan jawaban bahwa harga harus dibayar karena dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Hal ini berarti bahwa investor mau membayar bunga untuk dana yang ia pakai disebabkan karena dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang diharapkan dapat menghasilkan penerimaan yang lebih besar daripada jumlah yang diinvestasikan. Kelebihan jumlah penerimaan diatas pengeluaran yang berupa keuntungan inilah yang merupakan daya tarik investor untuk melakukan investasi dan sekaligus sebagai sumber kemampuan bagi investor untuk membayar bunga

## 2. Teori Keynes

Teori ini mengatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang (Boediono,1985,82). Ada 3 motif mengapa orang membutuhkan uang tunai yang pertama untuk berjaga-jaga, kedua untuk transaksi dan yang ketiga untuk spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber timbulnya permintaan akan uang. Hal ini berarti bahwa orang pada umumnya menginginkan dirinya tetap likuid untuk memenuhi tiga motif tersebut, memegang uang tunai menjamin likuiditas pada orang tersebut. Keinginan orang untuk tetap likuid inilah yang membuat orang bersedia membayar harga tertentu untuk penggunaan uang tersebut.



### 3. Teori Abstinence

Teori ini mengatakan bahwa ketika kreditur menahan diri, ia menanggukkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain (Muhamad Syafii antonio, 1999,100-1001). Dalam teori ini lebih lanjut dikatakan bahwa si kreditur meminjamkan modal yang semestinya dapat mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri . Oleh karena itu si kreditur berhak mendapatkan bunga atas penanggukan keinginan untuk memanfaatkan uangnya tersebut.

### 4. Teori Kemutlakan Produktifitas Modal

Teori ini mengatakan teori kemutlakan produktifitas modal . Teori ini pada intinya mengatakan bahwa modal adalah produktif dengan sendirinya , modal dianggap mempunyai daya untuk menghasilkan barang lebih banyak daripada yang dapat dihasilkan tanpa modal itu .Modal dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan demikian , pemberi pinjaman layak untuk mendapatkan imbalan bunga.

Pendapat tentang konsep bunga yang antara lain disebutkan tersebut merupakan alasan mengapa pembayaran akan bunga khususnya dalam perjanjian kredit di bank merupakan sesuatu yang wajar diberikan.Hal ini berarti bahwa pembayaran bungan itu merupakan sesuatu yang wajar dalam dunia perekonomian karena dipandang bahwa orang yang meminjamkan modalnya terhadap orang lain sudah mengorbankan kesempatan yang diberikan kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan dari perolehan modal tersebut. Maka

wajar bagi pihak yang meminjamkan modal tersebut untuk memperoleh keuntungan yang berupa bunga dari sipeminjam.

## **II.2 Tinjauan Umum tentang Bank**

### **II.2.1 Pengertian Bank**

Pengertian bank dapat dilihat dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 7 tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatakan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian tersebut diatas dapat dikaji bahwa bank merupakan suatu lembaga intermediari atau lembaga perantara antara pihak yang kekuarangan dana dan pihak yang kelebihan dana . Bank dalam hal ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Pengertian bank juga dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan . Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subyek hukum yang berarti dapat mengikatkan diri dengan pihak ketiga ( Sentosa Sembiring, 2000:2).

Pengertian bank lain dengan pengertian perbankan yang berarti kegiatan-kegiatan dalam menjual belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan . penerimaani deposito untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga dan atau pembuatan , pemberian

pinjaman dan atau untuk tanpa barang-barang tanggungan , penggunaan uang yang ditempatkan atau diserahkan untuk disimpan (Abdulrahman:1996,86).

Dari pengertian tersebut dapat dikaji bahwa terdapat perbedaan antara bank dan perbankan yaitu bahwa pengertian bank menekankan pada lembaganya sedangkan pengertian perbankan mengandung arti lebih luas dari itu yaitu mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses bank melaksanakan kegiatan usahanya.

### **II.2.2 Hubungan Bank dengan Nasabah**

Hubungan bank dengan nasabah dapat dibedakan menjadi:

1. Hubungan kontraktual
2. Hubungan non kontraktual

Hubungan kontraktual yang dimaksud disini adalah bahwa hubungan antara nasabah dengan bank didasarkan pada perjanjian antara nasabah dengan bank , baik perjanjian pembukaan rekening, perjanjian kredit ataupun perjanjian perjanjian lain yang berkaitan dengan jasa yang dikeluarkan oleh pihak bank. Perjanjian yang terjadi biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang isinya ditetapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak bank . biasanya perjanjian baku ini biasanya dibuat dalam bentuk formulir.

Hubungan non kontraktual antara bank dengan nasabah yaitu suatu hubungan antara bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk

tertulis tetapi hubungan tersebut tetap ada dalam praktek perbankan. Hubungan yang non kontraktual ini dapat dibagi menjadi : pertama hubungan kepercayaan yaitu hubungan ini merupakan hubungan yang menjadi dasar beroperasinya suatu bank. Sebuah bank tidak akan dapat beroperasi tanpa kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di lembaga perbankan, seperti diketahui bahwa alternatif investasi yang ada meliputi berbagai pilihan mulai dari asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Hal ini berarti bila masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank akan digunakan sebagaimana seharusnya maka masyarakat tidak akan mengalihkan dananya ke lembaga keuangan yang lain. Oleh karena itu maka lembaga perbankan harus benar – benar menjaga kepercayaan nasabah ini.

Hubungan kontraktual yang kedua yaitu hubungan kehati-hatian. Hubungan ini sebenarnya berkaitan dengan hubungan kepercayaan yang dijelaskan sebelumnya. Hubungan ini dapat diartikan bahwa dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan maka pihak bank harus dapat menerapkan prinsip kehati-hatian pada waktu bank tersebut melakukan pendirian dan pada waktu bank beroperasi. Pada waktu bank berdiri prinsip kehati-hatian ini dapat diwujudkan dengan dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam pendirian sebuah bank. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian pada saat bank tersebut beroperasi yaitu pada saat pemberian kredit maka bank tidak boleh mengucurkan kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit. Hal ini memang didasarkan bahwa dana yang ada adalah dana milik nasabah yang dipercayakan kepada pihak bank untuk digunakan sebaik-baiknya. Prinsip kehati-hatian ini merupakan prinsip yang benar-benar harus diterapkan dalam pendirian dan saat

beropersinya bank, perlu diingat bahwa runtuhnya industri perbankan pada masa lalu antara lain disebabkan tidak dipakainya prinsip kehati-hatian (prudential banking) ini. Hubungan kontraktual yang ketiga yaitu hubungan kerahasiaan . hubungan kerahasiaan yang dimaksud disini yaitu bahwa bank wajib merahasiakan keterangan yang berkaitan dengan nama nasabah dan jumlah simpanan, kecuali ada ketentuan lain. Hubungan kerahasiaan ini diatur dalam pasal 40, 41 A, 42A, pasal 43, pasal 44A, 47 UU No 10 tahun 1998. Keseluruhan peraturan – peraturan tersebut mengatur mengenai ruang lingkup, pihak-pihak yang dilarang untuk dan atau pengecualian yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Hubungan kerahasiaan ini harus dijaga oleh pihak bank dalam mengoperasikan banknya demi kepentingan dan kepercayaan nasabah dalam menjalankan usahanya.

### **II.2.3. Fungsi Bank**

Dalam pasal 3 UU No 10 tahun 1998 dikatakan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana , penyalur dana masyarakat . Dari ketentuan tersebut dapat dikaji bahwa sebenarnya fungsi bank tidak semata-mata tidak untuk kepentingan mencari keuntungan , tetapi terdapat misi yang berkaitan dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak pada ketentuan yang mengatakan bank sebagai lembaga perantara pihak yang kekurangan modal dengan pihak yang kelebihan dana . Fungsi ini tidak akan tampak dengan jelas pada lembaga keuangan yang bukan berbentuk bank .

Berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediary tersebut maka dibutuhkan suatu kesungguhan dari bank untuk mengelola dana dari pihak yang kelebihan dana berdasarkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yaitu suatu prinsip yang harus dipunyai oleh pihak bankir yang harus ada pada saat bank berdiri dan pada saat pemberian kredit. Penggunaan prinsip kehati-hatian sangatlah penting supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dapat terjaga dengan baik. Hal tersebut disebabkan karena existensi perbankan sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, dengan kata lain kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan harus benar-benar dijaga oleh lembaga perbankan sedemikian rupa antara lain dengan pelaksanaan prinsip kehati-hatian khususnya dalam pemberian kredit perbankan.

#### **II.2.4. Tinjauan Tentang Perbedaan Bank Menurut Jenisnya**

Bank merupakan lembaga yang mempunyai peranan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Menurut jenisnya bank dapat dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank umum merupakan suatu bank yang kegiatannya dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh bank umum antara lain :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan , giro, deposito berjangka , sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
2. memberikan kredit
3. menerbitkan surat pengakuan hutang
4. membeli, menjual atau menjamin risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya .
5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya
6. menempatkan dana pada bank lain, baik dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan wesel atas unjuk, cek atau sarana lainnya
7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. melakukan kegiatan anjak piutang , usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat

12. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah , sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indoonesia
13. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain itu bank umum dapat pula melakukan

1. Kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura , perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah , dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan dan pensiun yang berlaku.

Kewenangan bank umum untuk melakukan kegiatannya tersebut lebih luas dibandingkan kewenangan Bank Perkreditan Rakyat . Bank Perkreditan Rakyat



dalam melakukan usahanya dilarang melakukan kegiatan seperti menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal serta melakukan usaha perasuransian

#### **II.2.5 Tinjauan Tentang Bank Yang Beroperasi Secara Konvensional dan Bank Dengan Prinsip Bagi hasil**

Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat tersebut dapat menjalankan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah . Bank yang menjalankan usahanya secara konvensional berarti bank tersebut menggunakan pedoman tingkat bunga, sedangkan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang menggunakan sistem bagi hasil.

Sebenarnya pemerintah telah memasukkan kemungkinan pengembangan bank dengan prinsip syariah dalam UU Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. UU Nomor 7 tahun 1992 tersebut secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam PP no 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip bagi hasil. Ketentuan tersebut telah dijadikan dasar hukum beroperasinya bank syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Pada tahun 1998 dikeluarkan UU No 10 tahun 1998 yang lebih memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan

kegiatan usaha, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang yang khusus melaksanakan prinsip syariah. Hal ini dimaksudkan agar setiap bank dapat mengembangkan prinsip syariah ini dengan lebih baik. Hal itu juga didukung dengan dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 1999 seperti yang telah diubah dengan UU No 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang lebih mendorong industri perbankan syariah.

Perbedaan antara bank konvensional dan Bank syariah yaitu, pertama bahwa dalam bank konvensional maka penentuan tingkat suku bunga dibuat pada waktu akad tidak memperhatikan apakah nanti akan untung atau rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan risiko dibuat pada waktu akad dan berpedoman pada untung dan rugi. Kedua Bank Konvensional besarnya prosentase pada jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan di bank syariah besarnya nisbah berpedoman pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga pada bank konvensional Jumlah pembayaran bunga tetap walaupun jumlah keuntungannya berlipat ganda, sedangkan di bank syariah pembayaran keuntungan meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan dan jika terjadi kerugian maka ditanggung bersama. Perbedaan antara bank dengan prinsip bagi hasil dan konvensional tersebut didasarkan bahwa sistem bunga yang dipakai oleh perbankan yang selama ini ada dianggap haram oleh hukum Islam.

Produk yang dikeluarkan oleh perbankan dengan prinsip syariah hampir sama dengan produk yang dikeluarkan oleh perbankan yang beroperasi secara konvensional, tetapi tentu saja dalam perbankan dengan prinsip syariah ini

disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum agama Islam yang ada. Produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah antara lain :

### 1. Mudharabah

yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab. Dalam bank yang beroperasi secara konvensional maka dapat disamakan dengan perjanjian kredit. Perbedaannya memang dalam perjanjian kredit si penerima kredit tetap diberikan kewajiban membayar walaupun usahanya tidak menghasilkan keuntungan.

### 2. Musyarakah

Yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan

### 3. Murabahah

Yaitu suatu akad yang disetujui yang berupa jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perbankan yang beroperasi

secara konvensional sebagai contoh bila seseorang melakukan perjanjian kredit untuk membeli sebuah mobil. Dalam hal ini maka bank sudah menetapkan pinjaman pokok dan bunganya, sedangkan dalam perbankan syariah maka si pembeli tetap membayar harga pokoknya saja dan membayar margin keuntungan yang sudah ditentukan.

Sebagai contoh seseorang yang akan membeli mobil merek Toyota Avanza, diketahui harga mobil tersebut seharga Rp 90.000.000, si debitur akan membayar harga mobil tersebut secara kredit kepada bank syariah sebesar Rp 90.000.000 ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank.

Produk-produk diatas merupakan beberapa contoh produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah yang menerapkan konsep Hukum Islam didalam praktek perbankan sehingga layanan yang dikeluarkan oleh perbankan syariah diharapkan akan dapat sesuai dengan konsep hukum Islam yang melarang adanya pengenaan riba kepada debitur..

### **II.3. Pengaruh Fatwa MUI Tentang Larangan Riba Terhadap Kepercayaan**

#### **Nasabah Bank Konvensional.**

Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tanggal 16 desember 2003 bukanlah merupakan fatwa yang pertama kali dikeluarkan yang berkaitan dengan larangan riba. Sebelumnya dapat dilihat bahwa Majelis Tarjih Muhammadiyah pernah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan larangan riba yang meliputi masalah perbankan(1968,1972), keuangan secara umum(1976) dan koperasi simpan pinjam (1989) ,kemudian Lajnah bahtsul masa'il Nadhatul Ulama juga mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan bank dan membungakan uang pada tahun 1982. Pada intinya fatwa tersebut melarang kegiatan keuangan yang berdasarkan prinsip bunga termasuk kegiatan perbankan . Hal ini berarti bahwa fatwa yang berkaitan dengan bunga bank tersebut sudah ada sejak tahun 1968, sehingga fatwa tentang larangan bunga bank tersebut bukan merupakan sesuatu yang baru.

Berkaitan dengan fatwa MUI tersebut maka apakah fatwa tersebut membawa dampak terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang konvensional atau dengan kata lain apakah akan terjadi pengalihan dana masyarakat secara besar-besaran dari bank konvensional ke bank syariah. Untuk mengkaji masalah tersebut maka ada baiknya dilihat data dana nasabah bank konvensional sampai akhir tahun 2003 yaitu sebanyak 952,60 triliun.([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). 80 % dari dana tersebut adalah milik yayasan ,dana pensiun, dan nasabah non muslim. Jumlah dana yang terhimpun dalam bank konvensional tersebut memang jauh lebih besar dari dana nasabah

yang terhimpun di bank syariah kurang lebih 7 triliun dengan 2 Bank umum syariah, 3 unit usaha syariah dan 81 BPRS (Bank Indonesia, 2003:5).

Bila dilihat dari komposisi pemilik dana nasabah di bank konvensional tersebut maka hadirnya fatwa MUI tersebut secara kuantitas tidak akan mengakibatkan pengalihan dana yang cukup berarti dari bank konvensional ke bank syariah. Hal tersebut disebabkan karena 80 % dari dana nasabah di bank konvensional akan sulit untuk terpengaruh fatwa tersebut. Berarti tinggal 20 % dana yang terhimpun di bank konvensional tersebut akan terpengaruh, dan hal ini diserahkan kepada masyarakat. Hal ini juga dapat dilihat dari data yang diperoleh bahwa komposisi dana pihak ketiga di perbankan syariah bulan Desember 2003 sebesar 5,724,909 triliun rupiah dan kemudian pada bulan Januari 2004 sebesar 6,622,969 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan jumlah dana yang terhimpun di bank syariah sebelum dan sesudah Fatwa MUI yang menunjukkan kenaikan jumlah dana yang terhimpun tetapi bila dibandingkan dengan jumlah dana nasabah yang terhimpun di bank yang beroperasi secara konvensional maka kenaikan tersebut tidak signifikan. Dampak yang mungkin muncul dengan adanya fatwa tersebut adalah dampak psikologis bagi masyarakat yang berkaitan dengan keyakinan bahwa riba itu memang haram hukumnya. Tetapi untuk jumlah yang berkaitan dengan pengalihan dana ke bank syariah dari bank yang beroperasi secara konvensional tidak akan berpengaruh terlalu banyak.

Di lain pihak yang harus lebih dicermati dari persoalan diatas adalah bagaimana supaya bank syariah lebih dapat berbenah diri untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pengembangannya, serta peran Bank Indonesia untuk membuat perangkat peraturan perundangan yang dikhususkan bagi perbankan dengan sistem bagi hasil

tersebut. Hal yang terpenting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana bank syariah lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya masyarakat muslim dengan lebih meningkatkan layanan serta prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **I. Kesimpulan**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pertama

- 1 a. Bunga bank yang didalamnya terdapat unsur tambahan pada pinjaman pokok dan adanya unsur waktu tertentu termasuk riba, sehingga hukumnya haram. Namun hukum yang haram ini dapat disimpangi atau diberikan rukhsah atau keringanan selama adanya keadaan darurat, yang dimaksud karena masyarakat masih sangat membutuhkan, sedangkan sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum banyak beroperasi.
- b. Bunga bank yang disebut rente sepanjang sifatnya produktif dan tarif bunganya tidak ditetapkan dimuka maka tidak termasuk riba, karena didalamnya ada pembagian keuntungan pada kedua belah pihak.
2. Fatwa MUI yang dikeluarkan tanggal 16 Desember 2003 secara kuantitas tidak akan mengakibatkan pengalihan dana secara besar-besaran dari bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil .



## II. Saran

Pada saat sekarang ini memang dengan semakin banyaknya didirikan bank syari'ah maka sebagai sifat penghati-hati dalam melaksanakan syari'at Islam, disarankan kepada masyarakat Islam untuk sedikit demi sedikit beralih kepada bank syari'at dari bank konvensional. Untuk itu diperlukan sosialisasi tentang bank syari'ah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar Buku

Ahmad Hanafi, 1970, **Pengantar dan Sejarah Hukum Islam**, Bulan Bintang, Bandung

Boediono, 1985, **Ekonomi Moneter**, Liberty, Yogyakarta

Bank Indonesia, 2003, **Cetak Biru Perbankan Syariah**, Jakarta

Fuad Mohd Fachruddin, 1985, **Riba Dalam Bank Dan Koperasi, Perseroan Terbatas & Asuransi**, PT Al Ma'arif, Bandung

H. Karnaen Perwataatmadja Syafi'i Antonio, 1992, **Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf**, Yogyakarta

H. Mohammad Daud Ali, 1990, **Asas-Asas Hukum Islam**, Rajawali Pers, Jakarta

Mervin K. Lewis dan Lativa M Algaoud, 2003, **Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, Prospek**, PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.

Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, **Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek**, Gema Insani, Jakarta

Muhamad Syafii Antonio, 1999, **Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum**, Tazkia Institute, Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2000, **Hukum Perbankan**, Mandar Maju, Bandung.

Wahbah Az-Zuhaili, 1997, **Konsep Darurat Dalam Hukum Islam**, Gaya Media Pratama, Jakarta

### Daftar Peraturan Perundangan

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

### Sumber Lain

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)